



Pemberdayaan Santri dalam Mitigasi Bencana di Lingkungan Pondok Pesantren

Isnaiya Ramadhany Jamilah^{1*}, Deden Sumpena¹, Yuliani²

¹Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

²Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : naiyaramadhany22@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pemberdayaan santri dalam mitigasi bencana di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah, Sumedang, yang berada di kawasan rawan gempa dan longsor. Tujuannya mendeskripsikan peningkatan kapasitas santri, menilai kolaborasi melalui program Indonesia Disaster Adaptive (IDA) Camp, dan mengidentifikasi kontribusi pesantren dalam jejaring mitigasi daerah. Dengan metode Participatory Action Research (PAR) dan kerangka teori pemberdayaan Edi Suharto (mikro, mezzo, makro), hasil penelitian menunjukkan santri memperoleh pemahaman praktis, terlibat dalam Satgas Pesantren Adaptasi Bencana, serta membangun sinergi pentahelix. Transformasi ini menempatkan pesantren sebagai agen perubahan sekaligus simpul ketahanan komunitas yang potensial direplikasi di berbagai daerah.

Kata Kunci : Pemberdayaan Santri; Mitigasi Bencana; Pesantren; Participatory Action Research; IDA Camp

ABSTRACT

This study examines the empowerment of santri in disaster mitigation at Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah, Sumedang, an area prone to earthquakes and landslides. Through Participatory Action Research (PAR) and Edi Suharto's empowerment framework (micro, mezzo, macro), the research shows that santri enhanced their knowledge and skills, joined the Pesantren Disaster Adaptation Task Force, and built pentahelix collaboration. The pesantren has thus transformed from a beneficiary into an agent of change and a model of community-based resilience.

Keywords : *Santri Empowerment; Disaster Mitigation; Pesantren; Participatory Action Research; IDA Camp*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia karena posisinya di pertemuan tiga lempeng besar serta berada pada kawasan *Ring of Fire*. Kondisi ini membuat berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, hingga bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, terjadi hampir setiap tahun (BNPB, 2021). Dampaknya tidak hanya berskala nasional, tetapi juga dirasakan di tingkat lokal, termasuk Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pada akhir Desember 2023, gempa bumi dengan magnitudo 4,8 yang bersumber dari aktivitas Sesar Sumedang mengguncang wilayah tersebut dan memaksa pemerintah menetapkan status tanggap darurat (BMKG, 2023). Selain gempa, laporan BPBD Sumedang (2023) mencatat ratusan peristiwa longsor dan banjir dalam setahun terakhir, sehingga wilayah ini dikategorikan berisiko tinggi dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia (BNPB, 2021).

Salah satu kawasan rawan adalah Desa Sukamantri di Kecamatan Tanjungkerta, lokasi Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah, yang menurut peta kerentanan PVMBG (2023) berada di zona menengah–tinggi pergerakan tanah. Pesantren dengan lebih dari 800 santri ini mengalami kerentanan fisik dan non-fisik ketika bencana terjadi, mulai dari akses evakuasi yang terbatas hingga trauma psikologis yang dialami santri. Padahal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 menegaskan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga memiliki peran sosial dalam pemberdayaan masyarakat. Artinya, pesantren memiliki potensi strategis untuk dijadikan simpul ketahanan bencana berbasis komunitas.

Mitigasi berbasis komunitas sebenarnya telah dilakukan melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana). Namun, fokus penelitian selama ini masih dominan pada masyarakat umum, sementara santri sebagai kelompok strategis relatif terabaikan. Dalam konteks inilah program Indonesia Disaster Adaptive Camp (IDA Camp) hadir sebagai inisiatif yang menempatkan pesantren dan santri sebagai aktor utama kesiapsiagaan. Program ini tidak hanya melibatkan pelatihan dan simulasi evakuasi, tetapi juga mengusung pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang mendorong partisipasi santri, pengasuh, dan multi-stakeholders dari lima pilar pentahelix dalam seluruh tahapan kegiatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana IDA Camp berperan dalam pemberdayaan santri di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah. Secara khusus, penelitian menyoroti peningkatan kapasitas individu, penguatan kelembagaan melalui pembentukan Satgas Pesantren Adaptasi Bencana, serta kontribusi pesantren dalam memperluas jejaring mitigasi

hingga tingkat daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik pada kajian pemberdayaan berbasis komunitas sekaligus menawarkan wawasan praktis bagi pengembangan strategi mitigasi berbasis pesantren di wilayah rawan bencana.

LANDASAN TEORETIS

Penelitian ini didasarkan pada dua kerangka utama, yaitu teori pemberdayaan masyarakat dan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Keduanya dipilih karena relevan untuk memahami bagaimana santri di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah diberdayakan dalam program *Indonesia Disaster Adaptive (IDA) Camp*, khususnya dalam menghadapi ancaman bencana gempa bumi dan tanah longsor.

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) telah lama menjadi perbincangan dalam literatur pembangunan sosial. Pada dasarnya, pemberdayaan dipahami sebagai proses meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok agar memiliki kendali terhadap kehidupannya sendiri. Pentury (2023) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan strategi untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dengan menekankan partisipasi aktif, penguatan kapasitas, dan peningkatan keterampilan. Artinya, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai penerima pasif bantuan, tetapi sebagai aktor utama pembangunan.

Noor (2025) menambahkan bahwa pemberdayaan setidaknya mencakup tiga dimensi fundamental: *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. Pertama, *enabling* berarti menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat mengembangkan potensi dirinya. Dalam konteks pesantren, ini dapat berarti penyediaan ruang belajar kebencanaan yang kondusif dan sesuai dengan kebutuhan santri. Kedua, *empowering* adalah penguatan kapasitas melalui praktik langsung, misalnya pelatihan simulasi evakuasi bencana. Ketiga, *protecting* menekankan pentingnya melindungi kelompok rentan dari ancaman yang dapat melemahkan mereka, termasuk memastikan keamanan fisik santri ketika terjadi bencana.

Lebih lanjut, Suharto (2017) menekankan bahwa pemberdayaan bukanlah konsep parsial, melainkan sebuah proses pembangunan yang holistik. Ia meliputi dimensi psikologis (peningkatan rasa percaya diri), dimensi sosial (penguatan jejaring komunitas), dan dimensi politik (akses pada sumber daya dan pengambilan keputusan). Indikator keberhasilan pemberdayaan, menurut Suharto, terlihat dari meningkatnya kesadaran kritis, terbukanya akses masyarakat pada sumber daya penting, serta adanya kemampuan untuk memengaruhi keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Prinsip-prinsip pemberdayaan juga menuntut adanya partisipasi, kesetaraan,

transparansi, dan keberlanjutan (Mardikanto & Soebiato, 2015). Partisipasi penting agar masyarakat merasa memiliki program; kesetaraan menghindarkan dominasi elit; transparansi membangun kepercayaan; dan keberlanjutan menjamin manfaat program tidak berhenti pada intervensi jangka pendek. Hal ini sejalan dengan pandangan Ife dan Tesoriero (2008) yang melihat pemberdayaan sebagai upaya memperkuat kendali masyarakat atas kehidupan mereka, sekaligus memperluas solidaritas dan kemandirian kolektif.

Secara operasional, Suharto (2014) membagi pemberdayaan ke dalam tiga level: mikro, mezzo, dan makro. Level mikro melibatkan intervensi langsung pada individu atau kelompok kecil, seperti konseling, pelatihan, dan pendampingan personal. Level mezzo menekankan penguatan komunitas, misalnya melalui kelompok belajar, organisasi santri, atau karang taruna pesantren. Level makro berfokus pada perubahan struktur sosial dan kebijakan yang lebih luas, seperti advokasi atau jejaring multi-stakeholder.

Dalam penelitian ini, ketiga level tersebut diaplikasikan pada konteks pesantren. Pada level mikro, santri memperoleh keterampilan praktis mitigasi bencana. Pada level mezzo, komunitas pesantren diperkuat melalui pembentukan Satgas Adaptasi Bencana. Sedangkan pada level makro, pesantren berperan dalam membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga kebencanaan, dan jaringan pesantren lain di Kabupaten Sumedang.

Selain teori pemberdayaan, penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan ini berakar pada tradisi penelitian kritis yang dipopulerkan oleh Kemmis dan McTaggart (2005), yang mendefinisikan PAR sebagai penelitian kolaboratif untuk mencapai perubahan sosial melalui partisipasi aktif. Berbeda dengan penelitian konvensional yang cenderung menempatkan masyarakat sebagai objek, PAR menjadikan mereka sebagai subjek aktif sejak awal.

Stringer (2014) menegaskan bahwa PAR memfasilitasi pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*), di mana peserta terlibat langsung dalam proses identifikasi masalah, pelaksanaan aksi, dan refleksi. Proses ini membangun kesadaran kritis (*critical consciousness*), sebagaimana digagas oleh Paulo Freire, bahwa masyarakat harus menyadari realitas mereka sendiri agar mampu melakukan transformasi sosial.

Tahapan PAR meliputi: *planning* (perencanaan kolaboratif), *acting* (pelaksanaan aksi nyata), *observing* (pengamatan proses dan hasil), dan *reflecting* (refleksi serta perencanaan siklus berikutnya). Keempat tahap ini bersifat siklikal, artinya refleksi dari satu siklus menjadi dasar perbaikan pada siklus selanjutnya.

Dalam perspektif pemberdayaan, PAR berfungsi ganda: menghasilkan pengetahuan akademik sekaligus mendorong transformasi sosial. Dengan kata lain, penelitian bukan hanya untuk mengetahui, tetapi juga untuk mengubah. Suharto (2017) melihat pendekatan ini sejalan dengan pemberdayaan, karena menyatukan aspek psikologis, sosial, dan politik dalam proses partisipatif.

Dalam konteks pendidikan pesantren, PAR memiliki relevansi yang kuat. Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi juga komunitas sosial yang terorganisir. Melalui program IDA *Camp*, santri tidak hanya diberi materi teoretis mengenai kebencanaan, tetapi juga dilibatkan dalam simulasi evakuasi, pembuatan alat mitigasi sederhana, serta evaluasi kolektif. Dengan demikian, PAR di pesantren memungkinkan santri menjadi learning community sekaligus *agent of change*.

Lebih jauh, penerapan PAR dalam IDA Camp menjadikan pesantren bukan hanya sebagai penerima bantuan eksternal, melainkan simpul strategis dalam jejaring mitigasi bencana daerah. Santri memperoleh manfaat ganda: peningkatan kapasitas individu (pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri) sekaligus penguatan posisi kolektif pesantren dalam struktur sosial masyarakat Sumedang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah di Desa Sukamantri, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, merupakan salah satu pesantren besar dengan jumlah santri lebih dari 800 orang. Pesantren ini terletak di kawasan perbukitan yang secara geografis tergolong rawan bencana, khususnya tanah longsor dan gempa bumi. Data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG, 2023) menunjukkan bahwa wilayah Sumedang bagian utara termasuk dalam kategori rawan longsor menengah hingga tinggi. Kondisi tersebut diperkuat oleh catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG, 2023) yang mencatat gempa berkekuatan $M = 4,8$ di Sumedang dan menimbulkan kepanikan masyarakat. Situasi ini memperlihatkan bahwa pesantren membutuhkan strategi mitigasi bencana yang sistematis dan berbasis komunitas.

Dalam konteks inilah, Indonesia Disaster Adaptive (IDA) Camp dilaksanakan sebagai bentuk kolaborasi lintas aktor. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan lebih dari 300 pesantren se-Kabupaten Sumedang dan melibatkan unsur pentahelix: pemerintah (BNPB, BPBD, TNI, Polri), akademisi, pelaku usaha, media, serta komunitas lokal. Kegiatan IDA Camp tidak hanya berupa penyuluhan, tetapi juga simulasi nyata terkait kesiapsiagaan bencana, yang mencakup logistik, evakuasi, kesehatan, komunikasi, hingga dukungan psikososial. Dengan demikian, pesantren bertransformasi dari sekadar lembaga pendidikan agama menjadi pusat edukasi sekaligus laboratorium sosial mitigasi bencana.

Pemberdayaan Santri dalam Mitigasi Bencana (Mikro Level)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa santri Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah memperoleh pengetahuan baru mengenai potensi dan risiko bencana melalui rangkaian kegiatan edukasi dalam program *Indonesia Disaster Adaptive (IDA) Camp*. Edukasi kebencanaan diberikan dengan pendekatan interaktif, seperti diskusi kelompok, ceramah, dan studi kasus, sehingga santri tidak hanya menerima informasi pasif, tetapi juga terlibat dalam proses berpikir kritis tentang realitas risiko yang ada di sekitar mereka. Materi yang disampaikan meliputi dasar-dasar kebencanaan, tanda-tanda awal gempa bumi dan tanah longsor, teknik evakuasi, serta manajemen risiko berbasis komunitas. Sebelum mengikuti program, sebagian besar santri hanya mengenal bencana sebatas pengalaman empiris, misalnya pernah merasakan guncangan gempa kecil atau melihat longsor yang menutup akses jalan desa. Namun setelah kegiatan berlangsung, pemahaman mereka menjadi lebih sistematis karena mampu menghubungkan faktor-faktor alam dengan kondisi geografis desa serta keterbatasan manusia dalam mengantisipasi dampaknya.

Peningkatan pengetahuan ini menunjukkan adanya proses *enabling*, sebagaimana dijelaskan Noor (2025), yakni upaya menciptakan suasana yang mendukung perkembangan potensi individu. Dengan memiliki pemahaman yang lebih baik, santri tidak lagi memandang bencana sebagai sekadar takdir yang datang tiba-tiba, melainkan fenomena yang dapat diantisipasi melalui mitigasi. Perubahan pola pikir ini menjadi dasar yang penting karena kesadaran kritis merupakan pintu masuk bagi perubahan sikap dan perilaku dalam menghadapi risiko. Hal ini sejalan dengan pandangan Suharto (2017) bahwa pemberdayaan bukan hanya soal pemberian akses terhadap sumber daya, tetapi juga menyangkut pembentukan kesadaran untuk bertindak. Transformasi kesadaran tampak jelas ketika santri mulai mengaitkan aktivitas sehari-hari dengan potensi risiko, misalnya menyadari perlunya jalur evakuasi yang jelas atau mempertimbangkan kembali keamanan struktur bangunan asrama.

Selain pengetahuan, santri juga memperoleh keterampilan praktis yang dapat diaplikasikan secara langsung dalam menghadapi situasi darurat. Mereka belajar merespons guncangan gempa dengan cara berlindung di tempat aman, keluar ruangan secara teratur, dan berkumpul di titik evakuasi. Mereka juga dilatih menggunakan alat sederhana untuk menolong korban, seperti membuat tandu darurat dari sarung atau kain, memindahkan korban dengan teknik aman, serta memberikan pertolongan pertama sederhana. Melalui kegiatan pemetaan lingkungan, santri diajak berjalan mengelilingi kompleks pesantren untuk mengidentifikasi titik-titik rawan, seperti bangunan dengan struktur rapuh, lereng curam, dan jalur akses yang berpotensi terputus ketika hujan deras. Bahkan sistem

komunikasi darurat tradisional seperti kentongan dimanfaatkan kembali sebagai peringatan dini, yang kemudian dipadukan dengan pemahaman tentang pentingnya koordinasi melalui media digital.

Keterampilan ini memperlihatkan adanya proses *empowering*, yaitu penguatan kemampuan individu melalui pengalaman nyata. Tidak hanya melatih aspek teknis, pelatihan ini juga menumbuhkan rasa percaya diri bahwa mereka mampu melakukan sesuatu ketika bencana terjadi. Beberapa santri mengaku bahwa sebelumnya mereka merasa tidak berdaya ketika mendengar kabar longsor atau gempa, karena menganggap penanganan bencana sepenuhnya urusan pemerintah atau relawan. Namun setelah mengikuti pelatihan, mereka menyadari bahwa tindakan sederhana seperti memberi peringatan dini, membantu evakuasi, atau memberikan pertolongan pertama dapat menyelamatkan nyawa. Hal ini menunjukkan pergeseran peran santri dari objek bencana yang pasif menjadi subjek aktif dalam mitigasi.

Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah penguatan mental dan spiritual. Santri diajak menafsirkan bencana dalam kerangka nilai-nilai Islam. Konsep *al-bala' wa al-musibah* dipahami sebagai ujian yang menuntut kesabaran sekaligus ikhtiar, bukan kepasrahan pasif. Nilai *hifdz al-bi'ah* atau menjaga lingkungan diintegrasikan sebagai dasar teologis bagi mitigasi bencana. Pemahaman ini memperkuat aspek psikologis santri, karena mereka tidak hanya belajar menghadapi bencana secara teknis, tetapi juga membangun ketangguhan mental untuk tetap tenang, sabar, dan sigap ketika musibah terjadi. Spiritualitas yang ditanamkan memperluas motivasi kolektif; kesiapsiagaan tidak lagi dipandang semata sebagai kewajiban teknis, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan religius untuk melindungi diri dan membantu sesama.

Transformasi tersebut terlihat nyata dalam perubahan perilaku sehari-hari. Sebagian santri berinisiatif menggambar denah pesantren dan menandai jalur evakuasi dengan cat sederhana tanpa menunggu instruksi pengasuh. Kentongan yang sebelumnya hanya dianggap alat tradisional, kini diberi makna baru sebagai simbol komitmen kolektif terhadap kesiapsiagaan bencana. Kebiasaan baru juga mulai muncul, misalnya santri lebih memperhatikan penataan barang di kamar agar tidak membahayakan ketika gempa, serta memperhatikan kondisi tanah di sekitar asrama saat musim hujan. Perubahan perilaku ini menegaskan bahwa pemberdayaan tidak berhenti pada tataran kognitif, tetapi telah menyentuh ranah afektif dan psikomotorik.

Apabila dikaitkan dengan kerangka teori Edi Suharto (2014), pemberdayaan santri pada level mikro menunjukkan keberhasilan dalam tiga aspek utama, yakni peningkatan kesadaran kritis, kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan keberanian mengambil keputusan. Santri yang sebelumnya

bergantung pada pihak luar kini berani menginisiasi langkah sederhana untuk menjaga keselamatan bersama. Dengan demikian, mereka tidak lagi ditempatkan sebagai kelompok rentan yang harus selalu dilindungi, melainkan telah menjadi subjek yang berdaya dan siap berperan dalam mitigasi bencana.

Kolaborasi dan Penguatan Komunitas Pesantren (Mezzo Level)

Selain peningkatan kapasitas individu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan santri juga berlangsung melalui penguatan kelembagaan pesantren. Dalam konteks ini, Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah tidak hanya diposisikan sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga bertransformasi menjadi institusi sosial yang memiliki fungsi baru dalam bidang mitigasi bencana. Transformasi ini tampak dari pembentukan Satgas Pesantren Adaptasi Bencana (PAB) pasca pelaksanaan IDA *Camp*, yang diorganisir oleh pengurus pesantren bersama santri senior dan mendapat dukungan moral dari alumni.

Satgas ini berfungsi sebagai wadah kelembagaan yang mengoordinasikan upaya kesiapsiagaan di lingkungan pesantren. Struktur internal Satgas dibagi ke dalam beberapa bidang, seperti logistik, kesehatan, evakuasi, komunikasi, dan pemetaan risiko. Masing-masing bidang dipimpin oleh koordinator santri yang dipilih berdasarkan pengalaman, kapasitas, dan komitmen. Pembentukan Satgas ini menjadi penting karena mengubah peran santri dari peserta pelatihan menjadi pelaku aktif dalam manajemen risiko di tingkat komunitas. Dengan adanya struktur kelembagaan, proses pemberdayaan tidak lagi bersifat sporadis, tetapi mulai memiliki arah yang lebih sistematis dan terorganisir.

Meski demikian, observasi lapangan memperlihatkan bahwa Satgas PAB masih menghadapi kendala serius dalam implementasi, terutama terkait keterbatasan infrastruktur. Beberapa bangunan asrama bertingkat hanya memiliki satu tangga utama, sehingga ketika dilakukan simulasi evakuasi serentak, santri menumpuk di jalur tersebut. Situasi ini menimbulkan risiko baru berupa potensi kemacetan evakuasi dan peningkatan kerentanan saat bencana. Dalam skenario darurat, kepadatan di jalur tunggal dapat menyebabkan keterlambatan penyelamatan, bahkan menimbulkan korban tambahan akibat desakan atau terjebak di dalam bangunan. Dalam kondisi nyata, keterbatasan jalur ini dapat menimbulkan desakan, keterlambatan evakuasi, bahkan korban tambahan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan tidak cukup hanya mengandalkan semangat kolektif santri dan pengasuh, tetapi juga perlu ditopang dengan perbaikan infrastruktur fisik, standar prosedur, serta dukungan kebijakan.

Untuk menggambarkan kondisi secara lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan analisis *Hazard, Vulnerability, and Capacity* (HVC) sebagai instrumen evaluatif. Pendekatan ini menilai sejauh mana bahaya (*hazard*), kerentanan

(*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) berinteraksi dalam menentukan tingkat risiko di lingkungan pesantren.

Tabel 1. Analisis Risiko HVC di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah

Komponen	Uraian
<i>Hazard</i> (Bahaya)	<ul style="list-style-type: none"> • Tanah longsor dan pergerakan tanah (PVMBG, 2023: Kecamatan Tanjungkerta masuk zona menengah–tinggi rawan longsor). • Banjir bandang (BNPB, 2021: Sumedang termasuk wilayah dengan indeks risiko tinggi hidrometeorologi). • Gempa bumi (BMKG, 2023: Gempa M 4,8 di Sumedang akibat aktivitas Sesar Sumedang).
<i>Vulnerability</i> (Kerentanan)	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi pesantren di wilayah perbukitan dengan akses jalan sempit. • Kepadatan santri lebih dari 500 orang dengan variasi usia, termasuk anak-anak. • Minim sarana evakuasi permanen, misalnya ketiadaan jalur evakuasi yang jelas dan tanda permanen. • Arsitektur bangunan belum mendukung evakuasi cepat, seperti gedung bertingkat yang hanya memiliki satu tangga utama.
<i>Capacity</i> (Kapasitas)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Satgas Pesantren Adaptasi Bencana (Satgas PAB) melalui program IDA Camp. • Pelatihan dasar dan simulasi evakuasi secara kolektif.

Komponen	Uraian
<p><i>Risiko</i> (Tingkat Risiko)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jejaring pentahelix dengan BPBD, BNPB, TNI, Polri, akademisi, dan komunitas relawan. • Modal sosial pesantren berupa kedisiplinan santri, kepemimpinan kiai, serta tradisi gotong royong yang kuat. <p>Risiko masih tergolong tinggi. Meskipun kapasitas kelembagaan dan jejaring sudah terbentuk, kerentanan struktural (akses jalan, kepadatan santri, dan minim sarana permanen) serta bahaya alam (longsor dan gempa) tetap dominan. Diperlukan penguatan infrastruktur mitigasi, SOP yang rinci, serta sinergi berkelanjutan dengan pemerintah daerah.</p>

Sumber: Data lapangan, wawancara penelitian, serta dokumen BNPB (2021), BMKG (2023), PVMBG (2023).

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah berada dalam situasi risiko tinggi yang bersifat multidimensional. Bahaya yang mengancam bukan hanya satu jenis, tetapi kombinasi antara gempa bumi, tanah longsor, dan banjir bandang. Sementara itu, kerentanan fisik dan sosial, seperti keterbatasan jalur evakuasi, kepadatan santri, serta minimnya infrastruktur mitigasi, semakin memperburuk kondisi risiko.

Di sisi lain, kapasitas pesantren yang mulai terbentuk melalui Satgas PAB, pelatihan, dan dukungan jejaring pentahelix menunjukkan bahwa ada potensi besar untuk memperkuat ketangguhan. Namun, kapasitas ini belum cukup untuk menutup celah kerentanan struktural. Artinya, pemberdayaan di level mezzo masih perlu dilengkapi dengan kebijakan kelembagaan yang lebih kuat, infrastruktur fisik yang mendukung, dan koordinasi yang lebih intensif dengan lembaga resmi kebencanaan di tingkat kabupaten.

Dengan demikian, analisis HVC menegaskan bahwa Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah berada dalam posisi strategis sekaligus rentan. Strategis, karena ia telah membangun kapasitas internal melalui Satgas dan jejaring; tetapi rentan, karena secara geografis dan struktural masih menghadapi ancaman serius. Inilah

yang membuat transisi dari pemberdayaan mezzo menuju makro menjadi kebutuhan mendesak, agar pesantren tidak hanya mampu menyelamatkan dirinya, tetapi juga berkontribusi sebagai simpul ketahanan masyarakat di tingkat kabupaten.

Implementasi Pemberdayaan Santri dalam Penguatan Peran Pesantren di Tingkat Makro

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya tidak berhenti pada individu atau kelompok kecil, melainkan harus bermuara pada perubahan struktural dan sistemik di tingkat masyarakat luas. Hal inilah yang menjadi inti dari pemberdayaan makro sebagaimana dijelaskan Edi Suharto (2014), yaitu pemberdayaan yang diarahkan untuk mendorong perubahan kebijakan publik, membangun jejaring antar lembaga, serta menciptakan sistem sosial yang kondusif bagi kemandirian komunitas. Dalam konteks penelitian ini, proses pemberdayaan santri di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah mencapai dimensi makro ketika hasil IDA *Camp* tidak hanya melahirkan perubahan perilaku individu (mikro) atau kelembagaan internal (mezzo), melainkan juga menghasilkan struktur sosial baru yang terintegrasi dengan sistem kebencanaan Kabupaten Sumedang.

Transformasi peran pesantren di tingkat makro tampak jelas melalui pengukuhan Satgas Pesantren Adaptasi Bencana (PAB) dan Relawan Masyarakat Peduli Gempa (REMPUG) Sumedang Tandang pada 26 Januari 2024. Dua entitas kelembagaan ini lahir sebagai hasil konkret dari IDA *Camp*. Satgas PAB berfungsi mengoordinasikan kesiapsiagaan internal pesantren, sedangkan REMPUG berperan memperluas jejaring ke tingkat kabupaten. Dengan demikian, posisi pesantren mengalami peningkatan legitimasi sosial maupun formal, tidak lagi dipandang semata sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi sebagai aktor strategis dalam penanggulangan bencana.

Pengakuan ini diperkuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang. Dalam wawancara dengan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Ibu Dewi Juwita, dinyatakan bahwa keberadaan Satgas PAB dan REMPUG sangat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat koordinasi saat terjadi bencana. Sebelum ada IDA *Camp*, santri sering diposisikan sebagai kelompok rentan yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Namun, pasca-IDACamp, santri justru dipandang sebagai mitra pemerintah yang bisa mengambil peran penting dalam pengorganisasian evakuasi, penyebaran informasi, dan mobilisasi relawan. Pernyataan ini menegaskan terjadinya pergeseran posisi dari objek menjadi subjek, dari penerima manfaat menjadi pelaku aktif, serta dari pihak yang dianggap rentan menjadi agen ketahanan lokal.

Peran makro pesantren tidak bisa dilepaskan dari integrasinya dalam jejaring

pentahelix. Model pentahelix menekankan pentingnya sinergi antara lima pilar: pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media (Helixson, 2019). Dalam IDA *Camp*, kelima unsur ini hadir dan berinteraksi secara langsung. Pemerintah diwakili oleh BPBD, BNPB, TNI, dan Polri yang memberikan dukungan kebijakan dan teknis; akademisi terlibat dalam penyusunan modul edukasi kebencanaan; dunia usaha membantu dari sisi logistik; media lokal dan nasional mempublikasikan kegiatan; sementara komunitas hadir melalui forum pesantren dan kelompok relawan.

Pesantren berada di pusat interaksi ini. Ia berperan sebagai simpul penghubung yang menyatukan aktor-aktor berbeda dengan latar belakang dan kepentingan beragam. Keberhasilan pesantren dalam memosisikan diri di dalam jejaring pentahelix memperlihatkan bahwa pemberdayaan makro bukan sekadar hasil internalisasi nilai atau pembentukan struktur kelembagaan, melainkan kemampuan menjalin relasi sosial yang produktif dengan aktor eksternal. Dalam perspektif teori modal sosial (Putnam, 1993), langkah ini mencerminkan adanya peningkatan modal jembatan (*bridging social capital*), yaitu kemampuan komunitas untuk menghubungkan diri dengan jaringan sosial yang lebih luas guna mencapai tujuan kolektif.

Meski capaian tersebut patut diapresiasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan makro pesantren masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, dari sisi kebijakan, belum ada regulasi daerah yang secara eksplisit mengintegrasikan pesantren ke dalam sistem penanggulangan bencana. Selama ini, keberadaan pesantren baru sebatas pengakuan sosial dan kemitraan informal dengan BPBD. Tanpa regulasi formal, posisi pesantren rawan berubah seiring pergantian kepemimpinan atau perubahan prioritas kebijakan.

Kedua, dari sisi struktural, pesantren masih menghadapi keterbatasan infrastruktur fisik. Jalur evakuasi yang minim, asrama bertingkat dengan hanya satu tangga, dan akses jalan menuju pesantren yang sempit merupakan kerentanan nyata. Dalam simulasi evakuasi yang dilakukan, terlihat bahwa santri kerap menumpuk di jalur keluar sehingga berpotensi menimbulkan kepanikan. Situasi ini menimbulkan risiko sekunder berupa potensi korban jiwa bukan hanya karena bencana utama (gempa atau longsor), tetapi karena kepadatan dan keterbatasan sarana evakuasi. Dengan demikian, meskipun kapasitas kelembagaan meningkat, kerentanan fisik tetap menjadi penghambat serius.

Ketiga, dari sisi keberlanjutan, kegiatan IDA Camp masih bersifat event-based. Artinya, program berjalan intensif selama pelatihan berlangsung, tetapi setelahnya berpotensi melemah jika tidak diintegrasikan ke dalam kurikulum atau agenda rutin pesantren. Keberlanjutan program sangat bergantung pada

kepengurusan pesantren dan antusiasme santri baru. Tanpa strategi regenerasi yang jelas, Satgas PAB dan REMPUG berisiko kehilangan energi penggerak setelah beberapa tahun.

Temuan ini selaras dengan beberapa penelitian sebelumnya. Syarifuddin (2021) dalam studi tentang pesantren di Jawa Tengah menemukan bahwa pesantren memiliki potensi besar dalam kesiapsiagaan bencana karena modal sosial yang kuat, tetapi menghadapi kendala struktural berupa keterbatasan infrastruktur dan dukungan kebijakan. Demikian pula, penelitian yang dilakukan oleh Rohman (2022) di Jawa Timur menunjukkan bahwa keberlanjutan program kesiapsiagaan pesantren sangat ditentukan oleh dukungan pemerintah daerah dan integrasi ke dalam kebijakan formal. Dengan membandingkan hasil penelitian ini, dapat dipahami bahwa tantangan yang dihadapi Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah bukanlah kasus unik, melainkan fenomena umum di banyak pesantren Indonesia.

Namun, penelitian ini juga memberikan catatan positif bahwa IDA *Camp* mampu menghasilkan model kolaborasi yang lebih konkret melalui pembentukan REMPUG. Hal ini jarang ditemukan dalam penelitian sebelumnya, di mana pesantren cenderung berhenti pada level internalisasi nilai tanpa membangun jejaring kelembagaan formal. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini adalah memperlihatkan bagaimana pesantren dapat melampaui peran tradisionalnya dan memasuki ranah kebijakan publik.

Jika dilihat dari kerangka teori risiko Carter (2008), posisi pesantren saat ini berada pada titik transisi. Bahaya (*hazard*) berupa longsor, gempa, dan banjir tidak dapat dieliminasi; kerentanan (*vulnerability*) masih tinggi karena keterbatasan fisik dan kepadatan santri; kapasitas (*capacity*) mulai terbentuk melalui Satgas PAB dan jejaring REMPUG. Dengan kata lain, meski risiko keseluruhan masih tinggi, tren pemberdayaan menunjukkan adanya pergeseran menuju pengurangan risiko (*risk reduction*).

Dalam kerangka teori pemberdayaan Suharto (2017), pesantren telah menjalani tiga level pemberdayaan secara utuh: mikro (individu santri terampil), mezzo (kelembagaan Satgas PAB), dan makro (jejaring kebijakan REMPUG). Integrasi ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan bukanlah proses linier, melainkan siklus berkesinambungan yang saling memperkuat. Level mikro menyediakan agen-agen perubahan; level mezzo menyediakan struktur kelembagaan; dan level makro menyediakan sistem sosial dan kebijakan yang menopang keberlanjutan.

Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur tentang mitigasi bencana berbasis komunitas, khususnya dalam konteks pesantren. Selama ini, sebagian besar kajian mitigasi bencana lebih menekankan pada aspek teknis atau

institusi formal pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga berbasis agama seperti pesantren memiliki peran strategis yang belum banyak diangkat dalam literatur ilmiah.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk lebih serius mengintegrasikan pesantren ke dalam rencana kontinjensi resmi. Pesantren dengan basis massa santri yang besar, struktur sosial yang kuat, dan legitimasi kultural yang tinggi dapat menjadi simpul penting dalam mempercepat respons bencana. Selain itu, bagi pengelola pesantren, penelitian ini menegaskan pentingnya memperkuat infrastruktur fisik dan menyusun SOP kebencanaan yang lebih rinci agar kapasitas kelembagaan yang telah dibangun dapat benar-benar efektif ketika bencana terjadi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan santri melalui IDA *Camp* di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah telah menghasilkan transformasi signifikan pada level makro. Pesantren tidak lagi berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dalam jejaring kebencanaan Kabupaten Sumedang melalui Satgas PAB dan REMPUG. Transformasi ini memperlihatkan bahwa pesantren dapat berfungsi sebagai simpul ketahanan lokal yang tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh. Namun, keberhasilan ini harus diikuti dengan upaya penguatan kebijakan, infrastruktur, dan keberlanjutan program agar pesantren benar-benar mampu menjalankan peran strategisnya dalam jangka panjang.

Tantangan dan Kekurangan

Meskipun pelaksanaan *Indonesia Disaster Adaptive (IDA) Camp* di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan kapasitas santri dan kelembagaan pesantren, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan dan kekurangan yang patut mendapat perhatian. Tantangan ini muncul baik dari aspek struktural, kelembagaan, maupun kultural. Temuan ini penting karena menggambarkan keterbatasan yang masih dihadapi pesantren dalam mewujudkan kesiapsiagaan bencana yang berkelanjutan, sekaligus menjadi titik tolak bagi pengembangan strategi di masa depan.

Salah satu tantangan paling mendasar adalah keterbatasan infrastruktur fisik pesantren. Observasi lapangan memperlihatkan bahwa beberapa bangunan asrama bertingkat hanya memiliki satu tangga utama, sehingga menimbulkan potensi bahaya ketika dilakukan evakuasi serentak. Kondisi ini menyebabkan penumpukan santri di jalur evakuasi yang sempit, memperbesar risiko jatuh, terinjak, atau terjebak jika bencana sungguhan terjadi. Selain itu, jalur evakuasi formal hampir tidak tersedia; tidak ada rambu permanen atau penanda arah yang dapat memandu santri menuju titik kumpul. Dalam konteks manajemen bencana,

kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kapasitas individu dan kelembagaan mulai terbentuk, kerentanan fisik bangunan masih menjadi faktor penghambat yang serius. Tanpa perbaikan infrastruktur, simulasi yang dilakukan dalam IDA *Camp* tidak akan sepenuhnya efektif bila diterapkan pada situasi nyata.

Tantangan kedua berkaitan dengan ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) formal yang menjadi acuan baku dalam manajemen bencana di pesantren. Mekanisme evakuasi dan respon bencana memang sudah dipraktikkan melalui simulasi, namun pelaksanaannya masih bergantung pada pengalaman sesaat dari para peserta. Ketika dilakukan pergantian pengurus atau terjadi regenerasi santri, pengetahuan praktis ini berisiko hilang. Ketiadaan SOP juga berimplikasi pada inkonsistensi pelaksanaan evakuasi. Misalnya, dalam simulasi yang diamati, terdapat santri yang bergerak ke arah berbeda atau bingung menentukan jalur keluar karena tidak ada pedoman tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan sistem kesiapsiagaan belum sepenuhnya terjamin, dan upaya mitigasi masih bersifat *event-based*.

Tantangan berikutnya adalah keberlanjutan program IDA *Camp* yang cenderung terikat pada momen pelatihan tertentu. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kegiatan IDA *Camp* di pesantren berlangsung intensif selama pelatihan tiga hari, namun setelahnya aktivitas kesiapsiagaan relatif menurun. Tidak ada mekanisme pelebagaan yang memastikan bahwa materi dan keterampilan yang diperoleh santri dapat diintegrasikan secara sistematis ke dalam kurikulum pesantren. Misalnya, pelajaran fiqih atau akhlak belum mengadopsi konten kebencanaan sebagai materi ajar tambahan, padahal secara konseptual nilai-nilai Islam sangat relevan dengan etika menjaga keselamatan diri dan lingkungan. Tanpa integrasi dalam sistem pendidikan pesantren, nilai kesiapsiagaan cenderung berhenti pada level pengetahuan jangka pendek, bukan menjadi budaya yang mengakar.

Selain itu, penelitian ini menemukan kendala signifikan dalam hal regenerasi kader Satgas Pesantren Adaptasi Bencana (PAB). Satgas PAB yang dibentuk pasca-IDA *Camp* terdiri dari santri senior, pengurus, serta mendapat dukungan alumni. Namun, struktur kelembagaan ini sangat bergantung pada keberadaan individu tertentu. Ketika santri senior lulus atau berpindah, ada risiko keberlanjutan satgas menjadi lemah. Belum terdapat sistem kaderisasi formal yang menjamin bahwa santri baru secara otomatis mendapatkan pelatihan kebencanaan dasar. Kondisi ini berpotensi menciptakan kekosongan kelembagaan di masa depan, sehingga keberhasilan IDA *Camp* dapat terhenti bila tidak ada regenerasi yang sistematis.

Tantangan lain muncul dari aspek budaya dan persepsi komunitas pesantren terhadap bencana. Meskipun sebagian besar santri menunjukkan antusiasme

dalam mengikuti simulasi, masih ada pandangan yang menempatkan bencana semata-mata sebagai takdir ilahi tanpa perlu diantisipasi. Narasi “pasrah” ini seringkali membuat upaya mitigasi dianggap kurang penting. Sebagian pengurus bahkan beranggapan bahwa terlalu sering mengadakan simulasi dapat menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Perspektif semacam ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan keagamaan dan pendekatan ilmiah dalam memahami risiko bencana. Padahal, literatur kebencanaan berbasis Islam menegaskan bahwa ikhtiar dan kesiapsiagaan merupakan bagian dari amanah menjaga kehidupan.

Dari sisi eksternal, tantangan juga datang dalam bentuk keterbatasan dukungan struktural dari pemerintah daerah. Meski BPBD Sumedang menyatakan komitmen untuk menjadikan pesantren sebagai simpul strategis, implementasi nyata masih terbatas pada saat kegiatan IDA *Camp* berlangsung. Setelah kegiatan selesai, hubungan antara pesantren dan pemerintah cenderung tidak berlanjut dalam bentuk pendampingan reguler, monitoring, atau dukungan sarana prasarana. Kondisi ini memperlihatkan adanya gap antara simbolisme kolaborasi dengan praktik keberlanjutan. Padahal, dalam kerangka pemberdayaan makro sebagaimana dikemukakan Suharto (2014), keberhasilan sebuah komunitas sangat ditentukan oleh dukungan kebijakan dan sistem sosial yang lebih luas.

Selain tantangan kelembagaan dan eksternal, penelitian ini juga menemukan kendala dalam pemanfaatan jejaring pentahelix. IDA *Camp* pada dasarnya melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan komunitas lokal. Namun, sinergi tersebut masih bersifat seremonial. Keterlibatan media, misalnya, terbatas pada liputan kegiatan tanpa ada program lanjutan untuk menyebarkan edukasi kebencanaan kepada masyarakat luas. Peran pelaku usaha juga belum terlihat dalam bentuk kontribusi nyata seperti dukungan logistik atau investasi pada sarana mitigasi. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor belum mencapai tahap yang substantif dan berkelanjutan.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah minimnya integrasi nilai-nilai kebencanaan dengan kurikulum keagamaan pesantren. Meski nilai-nilai Islam sangat kaya dengan prinsip menjaga keselamatan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian lingkungan, namun pesantren belum sepenuhnya memanfaatkan potensi ini dalam proses internalisasi. Kajian kitab kuning, misalnya, jarang dikaitkan dengan isu kebencanaan, padahal prinsip *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa) dalam maqashid syariah sangat relevan dengan mitigasi. Akibatnya, santri lebih memahami bencana sebagai fenomena alam semata, bukan sebagai amanah untuk diantisipasi. Kurangnya integrasi ini membuat pesantren kehilangan peluang strategis untuk menjadikan mitigasi sebagai bagian integral dari tradisi pendidikan Islam.

Lebih jauh, tantangan juga terlihat dalam aspek sumber daya manusia dan ketersediaan alat pendukung. Satgas PAB yang sudah terbentuk memang memiliki struktur, tetapi minim peralatan. Misalnya, tidak tersedia alat komunikasi darurat, kotak P3K yang memadai, atau logistik dasar seperti masker, senter, dan peluit. Kondisi ini membuat simulasi yang dijalankan tidak sepenuhnya realistis, karena belum melibatkan peralatan yang biasanya dibutuhkan saat bencana sungguhan. Keterbatasan anggaran pesantren menjadi faktor utama mengapa kesiapsiagaan ini masih sebatas pada level pengetahuan dan latihan fisik, bukan pada kesiapan peralatan.

Dari seluruh tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa program IDA *Camp* di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah meskipun berhasil menumbuhkan kesadaran dan kapasitas awal, masih menghadapi berbagai kekurangan yang berimplikasi pada keberlanjutan. Keterbatasan infrastruktur, ketiadaan SOP, kurangnya integrasi dalam kurikulum, lemahnya regenerasi kader, hingga minimnya dukungan eksternal menjadi faktor yang harus segera ditangani agar pesantren benar-benar dapat berperan sebagai pusat ketahanan komunitas. Tantangan ini sekaligus menunjukkan bahwa pemberdayaan santri tidak dapat berhenti pada level individu, melainkan harus ditopang oleh sistem kelembagaan yang kokoh dan dukungan kebijakan yang berkesinambungan.

Refleksi dan Saran

Penelitian mengenai pemberdayaan santri dalam mitigasi bencana melalui program *Indonesia Disaster Adaptive (IDA) Camp* di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah Sumedang memperlihatkan dinamika yang kaya sekaligus kompleks. Di satu sisi, kegiatan ini menunjukkan potensi besar pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat berbasis nilai keislaman. Di sisi lain, penelitian ini juga membuka mata bahwa pemberdayaan santri dalam konteks kebencanaan masih menyisakan sejumlah keterbatasan. Dari sinilah refleksi lahir: apa arti capaian yang sudah diraih, apa makna dari berbagai hambatan yang ditemukan, serta bagaimana arah pengembangan ke depan agar pesantren dapat berfungsi secara lebih optimal sebagai simpul ketahanan komunitas.

Refleksi pertama muncul dari dimensi individu (mikro). Pelatihan IDA *Camp* jelas menumbuhkan kesadaran dan keterampilan santri terkait mitigasi bencana. Mereka tidak lagi hanya menjadi objek pendidikan agama, melainkan subjek aktif dalam menjaga keselamatan jiwa. Kesaksian santri yang mengaku lebih percaya diri setelah simulasi evakuasi memperlihatkan adanya pergeseran kesadaran: bencana bukan lagi dilihat sebagai musibah semata, melainkan sebagai tantangan yang dapat dihadapi dengan kesiapan. Namun refleksi yang mengemuka adalah bahwa semangat ini masih sangat bergantung pada momen pelatihan. Tanpa penguatan berkelanjutan, kesadaran itu berpotensi memudar seiring

berjalannya waktu. Maka, saran yang lahir adalah perlunya menjadikan pendidikan kebencanaan bukan hanya sebagai kegiatan insidental, tetapi sebagai kurikulum kultural pesantren yang berulang, baik melalui kajian rutin, kegiatan ekstrakurikuler, maupun simulasi berkala. Dengan demikian, pemberdayaan mikro tidak berhenti pada satu momentum, tetapi tumbuh menjadi budaya yang mengakar.

Refleksi kedua berada pada level kelembagaan (*mezzo*). Pembentukan Satgas Pesantren Adaptasi Bencana merupakan lompatan penting, karena mengubah peran santri dari peserta pelatihan menjadi pelaku aktif yang mengoordinasikan kesiapsiagaan. Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan bahwa Satgas masih menghadapi keterbatasan teknis dan struktural. Simulasi evakuasi, misalnya, menunjukkan kepadatan santri di satu tangga utama, yang justru menciptakan risiko baru. Situasi ini mengajarkan bahwa kelembagaan tanpa infrastruktur pendukung hanya akan melahirkan kesiapsiagaan semu. Maka refleksi yang muncul adalah bahwa pemberdayaan kelembagaan harus dipahami secara holistik, mencakup tidak hanya struktur organisasi dan semangat kolektif, tetapi juga desain fisik, tata ruang, dan aksesibilitas. Saran yang dapat diberikan ialah agar Satgas PAB menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, dinas teknis, serta lembaga donor untuk memperbaiki infrastruktur pesantren, termasuk jalur evakuasi, tangga darurat, dan papan penunjuk permanen. Dengan begitu, pemberdayaan kelembagaan tidak lagi hanya simbolik, tetapi memiliki daya dukung nyata dalam menghadapi bencana.

Refleksi ketiga beranjak ke ranah makro. Penguatan Satgas PAB dan REMPUG Sumedang Tandang memperlihatkan bahwa pesantren mulai diakui dalam jejaring kebencanaan tingkat kabupaten. Hal ini adalah capaian besar, sebab pesantren tidak lagi berdiri sendiri, melainkan masuk dalam sistem kontinjensi daerah. Namun refleksi penting yang muncul adalah bahwa peran pesantren dalam jejaring makro masih rentan terjebak dalam formalitas. Tanpa dukungan kebijakan yang konkret, pengakuan itu berpotensi berhenti pada seremoni penguatan. Oleh karena itu, saran yang dapat ditarik ialah perlunya regulasi daerah yang mengintegrasikan pesantren dalam rencana kontinjensi resmi, serta mekanisme pendanaan yang mendukung keberlanjutan program. Pesantren harus didorong bukan hanya sebagai mitra tambahan, tetapi sebagai aktor utama dalam strategi kebencanaan lokal.

Refleksi berikutnya menyangkut dimensi spiritualitas. IDA Camp menempatkan doa, ngaji bersama, dan nilai keislaman sebagai inti dari setiap kegiatan. Ini menjadi kekhasan yang membedakan pemberdayaan pesantren dari model pelatihan kebencanaan lainnya. Nilai-nilai seperti *hifdzun nafs* (menjaga jiwa) dan *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif) memberi legitimasi teologis yang

memperkuat motivasi santri. Namun refleksi yang perlu dicatat adalah bahwa spiritualitas seringkali hanya hadir di ruang simbolik, belum sepenuhnya diturunkan ke dalam modul praktis. Misalnya, doa bersama dilakukan, tetapi belum ada pedoman yang mengaitkan tata cara ibadah dengan kondisi darurat bencana, seperti shalat dalam pengungsian atau manajemen ibadah ketika listrik padam. Oleh karena itu, saran yang lahir adalah perlunya pengembangan modul “fikih kebencanaan” yang kontekstual, agar spiritualitas tidak berhenti pada retorika, tetapi menjadi pedoman nyata dalam situasi krisis.

Refleksi lain muncul dari dimensi kolaborasi pentahelix. Penelitian ini menemukan bahwa sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan komunitas berjalan cukup baik dalam IDA *Camp*. Namun tantangan yang tampak adalah kesinambungan. Kolaborasi yang kuat selama acara berlangsung tidak selalu berlanjut setelah kegiatan berakhir. Refleksi dari kondisi ini adalah bahwa kolaborasi yang berbasis acara (*event-based collaboration*) cenderung rapuh, sementara pemberdayaan sejati membutuhkan jaringan yang permanen. Maka, saran yang dapat diajukan ialah membentuk forum komunikasi tetap lintas pentahelix dengan pesantren sebagai tuan rumah. Forum ini dapat menjadi wadah koordinasi, evaluasi, serta penyusunan program tindak lanjut yang berkelanjutan. Dengan cara ini, pesantren tidak hanya menjadi lokasi acara, tetapi juga simpul strategis dalam jejaring kebencanaan daerah.

Selain itu, refleksi juga menyentuh dimensi sosial-ekonomi. Pesantren Al-Hikamussalafiyah berada di lingkungan masyarakat menengah ke bawah, yang sehari-harinya bergantung pada pertanian. Dalam situasi bencana, kerentanan ekonomi masyarakat akan memperburuk dampak sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa unit usaha pesantren seperti koperasi dan usaha kecil sudah mulai menopang kebutuhan dasar. Namun refleksi yang muncul adalah bahwa potensi ekonomi ini belum diarahkan secara strategis untuk mendukung kesiapsiagaan bencana. Saran yang dapat diberikan adalah agar unit usaha pesantren didorong untuk memiliki cadangan logistik darurat, sistem tabungan kebencanaan, atau bahkan asuransi mikro berbasis komunitas. Dengan begitu, pemberdayaan ekonomi pesantren tidak hanya menopang pendidikan, tetapi juga menjadi modal sosial dalam mengurangi dampak bencana.

Refleksi terakhir menyangkut metodologi pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang menempatkan komunitas sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa PAR sangat efektif menumbuhkan rasa memiliki di kalangan santri dan pengasuh pesantren. Namun refleksi kritis yang muncul adalah bahwa siklus PAR yang dilaksanakan dalam IDA *Camp* baru berjalan sekali. Padahal esensi PAR adalah keberlanjutan siklus, di mana refleksi satu tahap harus melahirkan aksi baru yang lebih baik. Saran yang lahir dari

sini adalah agar siklus PAR diintegrasikan ke dalam kalender pesantren, misalnya melalui evaluasi triwulan atau tahunan, sehingga pemberdayaan tidak berhenti pada satu penelitian atau satu acara, tetapi terus berputar sebagai budaya kolektif.

Semua refleksi di atas mengarah pada satu pemahaman: bahwa pemberdayaan santri dalam mitigasi bencana adalah proses panjang yang membutuhkan komitmen lintas level individu, kelembagaan, hingga sistem makro. Pesantren memiliki modal sosial, spiritual, dan kultural yang sangat kuat, tetapi modal ini harus diiringi dengan dukungan struktural dan kebijakan yang berkelanjutan. Maka, saran terbesar yang dapat ditarik adalah perlunya menjadikan pesantren sebagai laboratorium ketahanan masyarakat, tempat di mana ilmu, spiritualitas, solidaritas, dan manajemen risiko berpadu menjadi satu. Jika hal ini terwujud, maka pesantren tidak hanya menjadi benteng iman, tetapi juga benteng kemanusiaan dalam menghadapi bencana.

PENUTUP

Penelitian mengenai Pemberdayaan Santri dalam Mitigasi Bencana di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah melalui Program *Indonesia Disaster Adaptive (IDA) Camp* memperlihatkan bahwa pesantren memiliki potensi besar sebagai aktor strategis dalam penguatan ketahanan komunitas menghadapi bencana. Melalui penerapan kerangka teori pemberdayaan masyarakat Edi Suharto (mikro, mezzo, makro) dan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)*, penelitian ini menemukan bahwa proses pemberdayaan santri berlangsung secara berlapis dan berkesinambungan, mulai dari peningkatan kapasitas individu, penguatan kelembagaan internal, hingga integrasi ke dalam jejaring kebencanaan daerah.

Pada level mikro, *IDA Camp* berhasil meningkatkan kapasitas individu santri dalam memahami risiko bencana serta keterampilan praktis mitigasi melalui edukasi, simulasi evakuasi, dan latihan tanggap darurat. Santri tidak lagi hanya menjadi penerima informasi, melainkan berkembang sebagai pelaku yang mampu menginternalisasi pengetahuan dan keterampilan tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi kebencanaan yang diberikan dalam bentuk diskusi, simulasi, dan praktik langsung terbukti mampu membangun rasa percaya diri, solidaritas, serta kesadaran kolektif untuk saling melindungi. Hal ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan di level mikro memiliki implikasi yang kuat terhadap perubahan perilaku individu dan pembentukan kesadaran kritis mengenai pentingnya mitigasi bencana.

Pada level mezzo, penguatan kelembagaan melalui pembentukan Satgas Pesantren Adaptasi Bencana (PAB) menjadi capaian penting dari program *IDA Camp*. Satgas ini berfungsi sebagai wadah kelembagaan yang menata peran santri,

pengurus, dan alumni dalam upaya kesiapsiagaan. Kehadiran Satgas PAB memperlihatkan bahwa pesantren tidak lagi hanya menempatkan santri sebagai peserta pelatihan, tetapi telah mengubah mereka menjadi aktor penggerak yang memiliki struktur organisasi jelas dengan pembagian bidang seperti logistik, kesehatan, evakuasi, dan komunikasi. Keberadaan Satgas juga memperkuat posisi pesantren sebagai pusat koordinasi internal dalam menghadapi bencana. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa Satgas masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait keterbatasan infrastruktur, jalur evakuasi yang sempit, serta minimnya sarana permanen pendukung keselamatan. Dengan demikian, meskipun kapasitas kelembagaan mulai terbangun, masih diperlukan intervensi lanjutan agar kelembagaan ini benar-benar mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

Pada level makro, penelitian ini menemukan bahwa IDA *Camp* telah membuka peluang bagi pesantren untuk terlibat lebih luas dalam jejaring kebencanaan daerah melalui kolaborasi pentahelix. Keterlibatan berbagai aktor, mulai dari BPBD, BNPB, akademisi, TNI, Polri, hingga forum pesantren di Kabupaten Sumedang, memperlihatkan bahwa pesantren mulai dipandang sebagai simpul penting dalam sistem kebencanaan. Jejaring ini tidak hanya memperluas akses pesantren terhadap sumber daya, tetapi juga memberikan legitimasi sosial yang menempatkan pesantren sebagai agen perubahan dalam membangun budaya kesiapsiagaan bencana di tingkat lokal. Namun demikian, penelitian juga menggarisbawahi bahwa keberlanjutan jejaring ini masih sangat bergantung pada inisiatif event-based seperti IDA *Camp*. Tanpa ada mekanisme formal yang mengikat, dikhawatirkan pesantren akan kembali terpinggirkan dari sistem kontinjensi daerah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa IDA *Camp* berhasil mendorong proses pemberdayaan santri yang komprehensif, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi. Keberhasilan IDA *Camp* tidak hanya terletak pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga pada perubahan struktur kelembagaan pesantren dan perluasan jejaring kolaborasi lintas sektor. Pesantren, dalam hal ini, telah menunjukkan peran ganda: pertama, sebagai lembaga pendidikan yang membentuk karakter religius dan sosial santri; kedua, sebagai pusat pemberdayaan masyarakat yang mampu berkontribusi nyata dalam membangun ketahanan bencana daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. (2020). *Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat: Peran Sosial Pesantren dalam Konteks Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Anandhi, A., & Muhtadi. (2023). Peran Baznas dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 118–128.
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2023). *Laporan Kejadian Gempa*

- Bumi Sumedang 31 Desember 2023. Jakarta: BMKG.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2021. Jakarta: BNPB.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). *The Action Research Planner*. Victoria: Deakin University.
- Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. (2023). Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Sumedang. Bandung: Badan Geologi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 191. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Carter, W. N. (2008). *Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook*. Manila: Asian Development Bank.
- Ridwan, M. (2019). *Pesantren dan Kemandirian Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Utami, I. B., & Safei, A. A. (2023). Peran komunitas Islam dalam menyemangati keagamaan para pemuda. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(2).
- Aprilia, W. K., Anwar, S., & Herdiana, D. (2021). Peran santri dalam pelestarian lingkungan. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(2).
- Rifa'i, A., Muzakki, A., & Nasir, M. (2023). Peran Pondok Pesantren Mahfudiyatul Islamiyah terhadap kualitas keagamaan masyarakat. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(2).